

Hakim dapat menerapkan penetapan restitusi terhadap tindak pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022.

B. Saran

1. Seharusnya dalam pembuktian para aparat penegak hukum lebih teliti dan melakukan pembaharuan sumber hukum berdasarkan regulasi baru yang telah berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pembuktian yang dapat menjadikan barang bukti sebagai alat bukti.
2. Hendaknya hukuman yang diberikan kepada pelaku juga perlu diberikan pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, agar perubahan focus hukum dapat terjadi, dari yang hanya memberikan pidana kepada pelaku, menjadi perhatian pengembalian hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Anwar, Saifuddin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Pelajar Offset, Yogyakarta;
- Asmadi, Erwin, 2012, *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*, PT. Sofmedia, Medan;
- Bakhri, Syaiful, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Rajawali Pers, Depok;
- Dirjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, PT. Rajawali, Jakarta;
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;
- _____, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung;
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Chalia Indonesia, Jakarta
- Hiarieej, Eddy OS, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta;
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta;
- Ibrahim, Johnny, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang;
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- _____, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung;
- Nasution, 2001, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Bumi Aksara, Jakarta;
- Pangaribuang, Luhut M. P, 2016, *Hukum Acara Pidana dan Hakim Ad Hoc*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta;
- Pillo, A, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Ahli Bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta;
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung;
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Chalia Indonesia,
 _____, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Rahmad, Riadi Asra dan Nadia Maharani, 2020, *Kebijakan Reformulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru;
- Sagala, Valentina, 2022, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Samudera, Teguh, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung;
- Santoso, M. Agus, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta;
- Sapardjaja, Komariah Emong dan Lies Sulistiani, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Dalam buku *Kekerasam terhadap Perempuan, Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung;
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 1987. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bina Aksara.
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana “Ide Dasar Double Track System dan Implikasinya”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang;

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung;
- Soesilo, R, 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor;
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta;
- Sudaryono dan N. Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta;
- Sunandar, Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosiologis*, Refika Aditama, Bandung;
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung;
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung;
- Waluyo, Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Hawasara, Wika, Ramlani Sinaulanm dan Tofik Yanuar, Penerapan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Nonformal Volume 08 (1)*. hlm 587 – 594.
- Putri, Vidya Sofianna dan Fadlan, 2020, Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian di Polsekta Batam Kota), *Zona Keadilan*, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020;
- Zainal, Asrianto Zainal, 2014, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Putusan Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh.

D. Internet

melalui *digilib.unila.ac.id*. diakses pada Selasa 25 Juli 2023;

<https://rewangrencang.com/apakah-boleh-hakim-mengambil-putusan-lebih-atau-kurang-dari-tuntutan-jaksa-penuntut-umum-dalam-ranah-hukum-acara-pidana/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023. Pukul 11.09 WIB;

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> , diakses pada 20 Februari 2023;

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77/?page=2> diakses pada 22 Agustus 2023. Pukul 10.32 WIB;

www.fh.unsoed.ac.id diakses pada Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 12.16 WIB.